

### **BAB III**

## **PENCALONAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA TETAP PBB DAN SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP PALESTINA**

Politik Luar Negeri Amerika Serikat sangat terlihat memihak kepentingan Israel. Siapapun Presiden AS pasti tak pernah lepas dari tekanan Israel. Dibawah Obama yang diharapkan mampu membawa perubahan berarti bagi dunia Islam khususnya Palestina ternyata tak jauh berbeda dengan Presiden AS sebelumnya. AS masih berpihak kepada sekutunya Israel. Keadaan ini membuat Palestina melalui otoritas Palestina Mahmud Abbas mengajukan surat peningkatan status Palestina di PBB, dari hanya sebagai Pengamat (Observer) menjadi anggota tetap (full membership).

Dalam bab ini akan dibahas tentang keanggotaan Palestina di PBB, dan juga mengenai proses pengajuan Palestina menjadi anggota tetap PBB. Selain itu, Bab ini juga membahas sikap Amerika Serikat yang menolak langkah Palestina ini yang dinilai tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel.

#### **A. Pencalonan Palestina Menjadi Anggota Tetap PBB**

Palestina melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kemerdekaannya, salah satunya dengan mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB. Proses pengajuan Palestina sedari awal telah mendapatkan ancaman veto dari AS, namun Palestina tetap melakukan segala cara agar bisa mendapatkan pengakuan internasional.

## 1. Upaya Palestina Mendapatkan Pengakuan Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang anggota hampir seluruh Negara didunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.<sup>57</sup>

Sejak berdiri pada tahun 1945 hingga 2011 terdapat 193 negara anggota PBB. Negara tersebut terdiri dari Negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional. Semua itu tidak termasuk Palestina. Status Palestina di PBB hanyalah sebagai peninjau (permanent observer) karena kedaulatan Palestina belum mendapatkan pengakuan internasional. Sebagai peninjau artinya Palestina bukanlah suatu Negara bagi PBB.

Sebagai *Permanent Observer* dalam PBB pun bisa meningkatkan statusnya menjadi anggota tetap PBB dengan ketentuan yang terdapat dalam piagam PBB dalam pasal 4 yang menyebutkan :

*“Membership in the Organization, in accordance with the Charter of the United Nations, is open to all peace-loving States that accept the obligations contained in the United Nations Charter and, in the judgment of the Organization, are able to carry out these obligations. States are admitted to membership in the United Nations by decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council”*<sup>58</sup>

Dalam ketentuan ini menandakan seluruh keanggotaan PBB terbuka bagi seluruh elemen Negara yang cinta damai dan atas persetujuan

<sup>57</sup> <https://www.un.org> diakses tgl 2 Januari 2012

Majelis umum yang sebelumnya telah direkomendasi oleh Dewan Keamanan PBB. Kedaulatan suatu Negara diakui secara internasional apabila Negara tersebut resmi menjadi bagian dari PBB.

Kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa merupakan identitas terpenting pada perubahan sebuah entitas menjadi sebuah Negara. Berbagai upaya pun dilakukan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan sama seperti yang didapat Israel. Berbagai Upaya telah ditempuh Palestina untuk mendapatkan haknya yaitu melalui jalur damai maupun jalur kekerasan, pada kenyataannya tetap saja tidak menghasilkan kesepakatan damai maupun kemerdekaan. Sampai saat ini, status Palestina masih belum jelas, secara historis dan de facto Palestina sudah bisa dikatakan sebagai sebuah Negara merdeka, tidak demikian dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan konvensi Montevideo 1933 pada pasal 1 mengenai Hak dan Kewajiban Negara menyatakan bahwa syarat terbentuknya negara menurut hukum internasional adalah memiliki penduduk tetap, memiliki wilayah, pemerintahan dan diakui oleh negara lain<sup>59</sup>. Adanya konvensi ini jelas sekali menunjukkan posisi Palestina saat ini. Namun, Palestina belum bisa sepenuhnya merdeka karena belum adanya pengakuan seutuhnya dari Negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat.

Melihat kenyataan bahwa Palestina tidak akan mendapatkan hak yang sama seperti yang diperoleh Israel, Palestina tidak hanya diam. Demi mendapatkan

kemerdekaannya, Otoritas Palestina menempuh cara lain yang lebih efektif, yaitu melalui jalur diplomasi multilateral di PBB. Jika Palestina diberikan keanggotaan penuh atau status pengamat Negara di PBB, itu artinya Palestina telah mendapatkan peluang besar bagi kedaulatan negaranya.

Pertama, Palestina berhak atas semua hak dan hak istimewa berdasarkan hukum internasional sebagai Negara merdeka. Hak-hak ini termasuk tidak dapat diganggu gugat hak-hak dan kekuasaan Negara dan kepala Negara; kekebalan hukum bagi kepala Negara; jalan lain bagi membela diri dalam menanggapi agresi bersenjata; kontrol yang efektif dari Negara atas wilayahnya; non-intervensi dalam internal Palestina; keanggotaan organisasi internasional, dan akses, konvensi perjanjian.

Kedua, kasus Palestina berhak untuk diterapkan ke komisi hak asasi manusia dari organisasi internasional termasuk PBB, serta pengadilan internasional. Untuk tujuan ini, misalnya, akan dapat mengambil sengketa hukum ke Mahkamah Internasional berdasarkan Pasal 32 undang-undang pengadilan, asalkan pihak lain yang bersengketa setuju untuk yurisdiksi pengadilan dalam hal ini.

Ketiga, setelah mengakui kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, Palestina akan dapat merujuk kejahatan kemungkinan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap rakyat Palestina untuk jaksa pengadilan, meminta inisiasi penyelidikan.

Keempat, tawaran Palestina dan perjuangan untuk mencapai negara dan

Dengan cara ini, perjuangan Palestina untuk kebebasan akan berubah dari isu politik murni ke dalam masalah hukum dengan dimensi beton.

Terakhir, seperti dicatat oleh Abbas dalam sebuah artikel yang diterbitkan di *The New York Times* pada 16 Mei: "Palestina akan bernegosiasi dari posisi salah satu anggota PBB yang wilayahnya diduduki oleh militer lain, bagaimanapun, dan bukan sebagai bangsa yang kalah siap menerima apa pun istilah yang diletakkan di depan kita." Sebuah laporan terbaru mengindikasikan bahwa Israel benar-benar prihatin dengan proses baru. Itulah beberapa alasan yang menguatkan misi Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB.

Ketidakadilan yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri, untuk itu Palestina melalui Abbas berusaha mewujudkan kemerdekaannya melalui PBB. Langkah pertama yang dilakukan Palestina adalah dengan mendaftarkan Palestina sebagai anggota tetap PBB.<sup>60</sup> Upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB bukan sekadar perlambang untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Keanggotaan penuh PBB tentu dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel, karena misi asli dari otoritas ini adalah untuk menegosiasikan perjanjian damai dengan Israel.

## **2. Proses Pengajuan Palestina menjadi Anggota Tetap PBB**

Demi mendapatkan hak Palestina sebagai Negara Bangsa, Palestina sungguh-sungguh dalam mengupayakan keanggotaannya dalam PBB. Hal ini

dilakukan untuk mengakhiri ketidakadilan yang selama ini terjadi di Palestina. Demi mencapai tujuan tersebut, pada tanggal 20 September 2011, Otoritas Palestina (OP) mengajukan proposal dan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam surat tersebut dijelaskan sikap para pejabat Palestina yang mendesak pemimpin masyarakat internasional untuk mendukung dan membantu Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Surat itu juga mencakup serangkaian upaya damai mereka menjelang pembukaan Sidang Umum PBB yang akan diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 September mendatang agar diakui sebagai negara yang merdeka dan menjadi anggota penuh PBB.

Berikut adalah sejumlah memo di dalam surat yang disiapkan oleh Palestina untuk di sampaikan pada sidang umum, dengan judul "*pengakuan dunia terhadap negara Palestina*";

- 1. Resolusi PBB nomer 181 dan 182 (resolusi pembagian oleh PBB tahun 1947) yang berisi kewajiban melihat dengan positif tuntutan negara Palestina untuk bergabung sebagai anggota PBB.*
- 2. Palestina diakui secara riil oleh 122 negara dan memiliki kedubes-kedubes atau perwakilan diplomasi di lebih dari 100 negara.*
- 3. Pengakuan dunia bukanlah alternatif dari perundingan dan bersandingan dengan prakarsa perdamaian Arab yang menetapkan pengakuan Arab terhadap Israel dan hubungan normalisasi antara mereka.*

4. *Jumlah warga penjajah di atas wilayah Israel naik setelah kesepakatan Oslo tahun 1993 menjadi dua kali lipat dari 236 ribu menjadi 500 ribu saat ini akibat pelanggaran Israel atas proses perdamaian.*<sup>61</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan pidato Abbas di depan Sidang Umum PBB jumat, 21 september 2011 di markas besar PBB New York. Presiden Palestina ini mengungkapkan permohonan Palestina sebagai negara anggota PBB dengan status penuh atautkah sebagai negara pengamat non-anggota PBB.<sup>62</sup>

Langkah ini dilakukan bukan untuk menggantikan negosiasi langsung dengan Israel, seperti yang selama ini dituduhkan Israel dan AS, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan yang berdaulat. Karena Palestina percaya bahwa pengakuan simbolis yang besar sebagai anggota penuh PBB akan membantu Palestina untuk mempertahankan kedaulatan maupun integritas negaranya, tentunya dengan bantuan pihak internasional. Suatu diplomasi tingkat tinggi yang cantik dan brilian dari seorang Mahmud Abbas.<sup>63</sup>

Setelah langkah pertama yang dilakukan Palestina dengan mengajukan proposal kemerdekaan kepada Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-Moon pada 20 September 2011 dan dibahas pada Sidang Umum PBB pada tanggal 21 September 2011, maka selanjutnya pembahasan permohonan keanggotaan penuh

---

<sup>61</sup> <http://gemadakwah.com/2011/08/siapa-mendukung-palestina-di-pbb.html>. Diakses pada 17 November 2012

<sup>62</sup> <http://www.dakwatuna.com/2011/09/14919/obama-dukungan-as-terhadap-israel-tak-akan-goyah/>. Diakses pada 17 November 2012

Palestina menjadi anggota PBB akan diteruskan kepada Dewan keamanan PBB. Dalam Dewan Keamanan PBB, Palestina harus mendapatkan persetujuan 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu Palestina juga harus mendapatkan dukungan minimum 75% dari anggota majelis umum PBB.<sup>64</sup>

Beberapa langkah untuk sebuah Negara menjadi anggota tetap PBB ada dalam Piagam PBB bagian kedua yang mengatakan bahwa semua keputusan dari pencalonan suatu Negara masuk dalam anggota PBB akan diputuskan oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB<sup>65</sup>. Berdasarkan piagam PBB sudah pasti Palestina harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB tentang peningkatan statusnya agar bisa dibahas dalam sidang di Majelis Umum PBB, tanpa adanya pengakuan dari DK PBB tentu saja Palestina tidak akan pernah mendapatkan pengakuannya di PBB.

Dari Sidang Umum 21 September 2011 lalu, menghasilkan keputusan bahwa syarat yang diperlukan untuk menjadi anggota penuh di PBB adalah persetujuan sembilan anggota dari 15 negara anggota Dewan Keamanan. Dan setelah para pejabat Palestina melakukan lobi dan penjajakan panjang, akhirnya sembilan negara (Gabon, Bosnia, Brasil, India, Lebanon, Nigeria, Afrika Selatan, China, dan Rusia) pada waktu itu berjanji akan menyertai deklarasi negara merdeka bersama rakyat Palestina. Karena kesembilan Negara tersebut merasa bersimpati atas perjuangan yang dilakukan Palestina serta keadaan yang dialami Palestina

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Brett D. Scafer and James Phillips, *How the U.S. Should Respond to the U.N. Vote for Palestinian*





## **B. Penolakan AS Terhadap Pencalonan Palestina Menjadi Anggota Tetap PBB**

Setelah Palestina menyampaikan keinginannya kepada Sekjen PBB, AS mulai memainkan perannya sebagai Negara terpenting dalam DK PBB. Proses AS menolak tindakan Palestina juga berdasarkan sikap Palestina sendiri. Pada mulanya AS mengungkapkan penolakannya melalui pidato-pidato kenegaraan ataupun sindiran-sindiran di media massa. Sampai pada titik AS memberikan ancaman veto jika Palestina tetap teguh pada pendiriannya.

### **1. Ultimatum AS Terhadap Palestina**

Sejak awal pencalonan Palestina ke PBB, penolakan sudah mulai terasa dari pihak AS dan sekutunya. AS terus meningkatkan upaya diplomatiknya guna menghalangi pencalonan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memimpin pelaksanaan diplomatik AS dalam rangka membujuk para anggota DK PBB agar tidak mendukung Palestina.<sup>68</sup> Sikap AS menolak langkah Palestina juga terlihat dari Pidato Presiden AS Barrack Obama pada Sidang Umum PBB 21 September 2011. Obama menyatakan : *"Perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terjadi melalui negosiasi, keanggotaan Palestina di PBB tidak akan menyelesaikan masalah,"*<sup>69</sup>

Pernyataan Obama inilah yang merupakan sikap AS terhadap konflik Palestina-Israel. Lebih lanjut Obama juga menegaskan bahwa pernyataan dan resolusi dari PBB tidak akan menyelesaikan konflik keduanya. Konflik

<sup>68</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/node/159640> diakses pada 5 Oktober 2012

tersebut harus diselesaikan Palestina dan Israel tanpa melibatkan pihak manapun.

Pembahasan panjang pun terjadi di Sidang Umum PBB pada 23 September 2011 terkait dengan pengajuan proposal kemerdekaan Palestina yang membahas tentang pengajuan diri Palestina menjadi anggota tetap PBB serta penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya Amerika Serikat, akhirnya proposal tersebut disetujui oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan diputuskanlah untuk membawa isu Palestina tersebut kepada Dewan Keamanan (DK) PBB yang kemudian akan mengkaji dan melakukan pemungutan suara untuk mencapai keputusan. Berdasarkan resolusi DK PBB, untuk mendapat persetujuan dibutuhkan 9 dari 15 anggota dewan, dengan syarat tidak ada veto dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>70</sup>

Pemungutan suara dilakukan di Dewan Keamanan PBB karena Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat di PBB, yang mana tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Disini Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> [www.hidayatullah.com/read/19029/27/09/2011/zionis.-obama-dan-cerita-tentang-palestina.html](http://www.hidayatullah.com/read/19029/27/09/2011/zionis.-obama-dan-cerita-tentang-palestina.html).

Diakses pada 22 November 2012

## **2. Penghentian Bantuan AS Kepada UNESCO**

Adanya ganjalan awal dari langkah Palestina ini, tak menyurutkan niat Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. Pemimpin Palestina tetap melancarkan upaya untuk memasukan Palestina dalam keanggotaan PBB melalui Majelis Umum PBB. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemimpin Palestina adalah memasukan Palestina ke Organisasi internasional dibawah PBB. Seperti UNESCO (United Nations Educational, Scientific and culture Organization ) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Upaya ini dimaksudkan untuk bisa sampai ke tahapan voting di DK PBB dengan pengakuan sebanyak mungkin dari Organisasi internasional, yang pada gilirannya menjadi tekanan bagi Negara-negara yang tidak mengakui Palestina.

Palestina Resmi menjadi anggota UNESCO pada 31 Oktober 2011. Namun keanggotaan Paletina di PBB tidak mengubah posisi Palestina dalam keanggotaan PBB. Palestina menjadi anggota UNESCO yang ke 195. Dalam voting yang digelar di kantor pusat UNESCO di Paris, Palestina didukung oleh 107 negara. Sementara 14 negara menolok dan 52 memilih abstain.<sup>72</sup>

UNESCO menjadi badan PBB pertama yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh setelah beberapa anggota UNESCO mengakui Palestina sebagai

<sup>72</sup> <http://www.unesco.org/new/en/media-services/single->

anggota ke 195 dari UNESCO pada Konferensi Umum Organisasi ke-36 pada 31 Oktober 2011.<sup>73</sup>

Status baru Palestina di UNESCO membuat AS semakin geram. Hal ini dibuktikan dengan statmen dari menteri luar negeri AS Hillary Clinton yang mengatakan bahwa UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum ada pengakuan status negaranya oleh PBB.

*"Saya Bingung, bagaimana bisa badan di PBB membuat keputusan status Negara saat isu ini tengah digodok di PBB. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status Negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB"*<sup>74</sup>

Langkah pemerintah AS menolak keanggotaan Palestina di UNESCO adalah dengan menyatakan menghentikan pemberian bantuan ke Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Seperti dijelaskan oleh juru bicara Kementrian Luar Negeri AS, Victoria Nuland :

*"Pemerintah Gedung Putih membatalkan pemberian bantuan sebesar US\$60 Juta yang rencananya diserahkan pada November 2011, Keanggotaan Palestina di UNESCO memicu pelanggaran legislative yang menyebabkan AS menghentikan pemberian kontribusi ke UNESCO"*<sup>75</sup>

Tidak berhenti sampai disitu, Palestina tetap mencari dukungan internasional agar kasusnya dibahas dalam sidang umum PBB di New York. Para Pemimpin Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan dukungan penuh terhadap permohonan Palestina untuk menjadi anggota tetap

<sup>73</sup> [http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/palestinian\\_flag\\_raised\\_at\\_unesco/](http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/palestinian_flag_raised_at_unesco/) diakses pada 7 Januari 2013

<sup>74</sup> <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/260340-unesco-resmi-akui-palestina-sebagai-anggota> diakses pada 7 Januari 2013

PBB.<sup>76</sup> Selain itu dukungan mengalir dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mengemukakan dukungannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa IV OKI.<sup>77</sup> Anggota gerakan Non-Blok (GNB) juga mengumumkan dukungannya terhadap Palestina ketika menteri luar negeri dari beberapa Negara GNB bertemu di kota Ramallah, Tepi Barat. KTT GNB yang ke-16 ini menghasilkan Teheran *Final Document*, yaitu pernyataan final Negara-negara anggota dan deklarasi bersama 120 anggota GNB yang mendukung Palestina<sup>78</sup>

### 3. Ancaman Veto Amerika Serikat

Syarat yang harus dipenuhi Palestina untuk menjadi bagian dari PBB adalah, proses pengajuan menjadi anggota tetap PBB harus bisa dibahas di Sidang Umum PBB melalui usulan dari DK PBB. Palestina harus didukung sedikitnya Sembilan anggota tidak tetap DK dan tidak mendapatkan veto dari anggota tetap DK PBB.

Hal ini lah yang menjadi halangan terberat Palestina untuk menuju PBB. AS merupakan ancaman bagi keberadaan Palestina karena AS lah yang selama ini menentang pencalonan Palestina untuk meningkatkan statusnya di PBB. Walaupun telah banyak Negara-negara yang telah mengakui keberadaan Palestina, Amerika Serikat tetap pada posisinya untuk menolak Palestina di PBB.

<sup>76</sup> <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/11/19/167019/ASEAN-Dukung-Palestina-Anggota-Penuh-PBB> diakses pada 01 Oktober 2012

<sup>77</sup> <http://news.liputan6.com/read/429841/oki-dukung-keanggotaan-penuh-palestina-di-pbb> diakses pada 01 oktober 2012

Amerika justru mengeluarkan ancaman veto jika Palestina tetap maju untuk menjadi anggota tetap PBB.

Seperti yang dikatakan oleh juru bicara AS Victoria Nuland :

*“Tindakan pemerintah itu bukan sesuatu yang mengejutkan. AS menentang langkah Palestina yang berusaha mendirikan sebuah Negara yang dapat dilakukan dengan negosiasi di New York, dan jika ada pemilihan suara di PBB, AS akan memveto,”*  
79

Hal ini menunjukkan jelas sikap AS yang dengan segala cara akan menghadang langkah Palestina untuk mendapatkan haknya di PBB. Disinilah terlihat jelas bahwa peta kekuatan politik di Dewan Keamanan PBB menggambarkan dominasi negara adidaya dan tarik-menarik kepentingan politik yang sangat kentara di Timur Tengah. Secara historis, tertundanya kemerdekaan Palestina disebabkan AS dan sekutunya tidak mempunyai kehendak politik untuk mengambil kebijakan yang memihak kepentingan rakyat Palestina.

Dan demi menghindari voting Dewan Keamanan PBB yang bisa menuntun ke penggunaan hak veto, Amerika Serikat mengubah taktik dengan memakai Kuartet Timur Tengah, yaitu gabungan diplomat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Kuartet akan mengeluarkan resolusi mengenai masalah Palestina dan Israel serta meminta kedua negara menetapkan jadwal untuk kembali ke perundingan damai yang terhenti.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/09/Ir8v3r-as-soal-negara-palestina-kami-akan-veto-di-dk-pbb-kami-akan-lawan-di-majelis-umum> diakses pada 24 september 2012

<sup>80</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/25/Is2jng-netanyahu-siap>

Setelah permasalahan Palestina dibawa ke Komisi Dewan Keamanan PBB, perundingan dilakukan pada tanggal 11 November 2011 di New York yang berakhir tanpa kesepakatan. Para delegasi yang hadir dalam perundingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tajam sehingga tidak menghasilkan rekomendasi untuk menerima permintaan Palestina. Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB. Hal ini disebabkan Amerika Serikat sebagai anggota tetap DK PBB yang juga sebagai sekutu kuat Israel mengeluarkan veto kepada Palestina. Dengan adanya hal ini berarti upaya Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB pun kandas.<sup>81</sup>

Wakil Sekertaris-Jenderal Politik Luar Negeri AS B. Lynn Pascoe menyampaikan dalam sidang DK PBB pada 27 September 2011 bahwa Palestina harus memulai perundingan damai kembali dengan Israel. *"Pencalonan Palestina menjadi anggota tetap PBB merupakan langkah sepihak, kontraproduktif."*<sup>82</sup>

Komitmen Amerika Serikat untuk memberikan veto kepada Palestina diungkapkan Presiden Barack Obama saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum ke -66 PBB di markas besar PBB, New York. *"Komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut,"*<sup>83</sup>

<sup>81</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/09/1r8v3r-as-soal-negara-palestina-kami-akan-veto-di-dk-pbb-kami-akan-lawan-di-majelis-umum> diakses pada 24 September 2012

<sup>82</sup> <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10396.doc.htm> diakses pada 10 Januari 2012

<sup>83</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/09/22/1rwc72-obama-dukungan->



Arah Politik Luar Negeri AS yang cenderung berpihak kepada sekutunya Israel menjadi hambatan besar bagi Palestina untuk meningkatkan status keanggotaannya di PBB dari yang sebelumnya hanya sebagai pengamat menjadi anggota tetap PBB. Dengan melakukan berbagai cara Palestina berjuang untuk mendapatkan kedaulatannya. Dengan masuknya Palestina menjadi anggota PBB artinya Palestina bisa mendapatkan haknya sebagai Negara yang berdaulat.

Pada proses awal pengajuan Palestina menjadi anggota tetap PBB sudah diganjil dengan ancaman veto dari AS. Palestina yang semula optimis karena berhasil mendapatkan dukungan dari Sembilan Negara DK PBB menjadi pesimis setelah mendapat ancaman veto AS. untuk mendapatkan haknya Palestina harus mendapatkan dukungan 9 dari 15 negara DK PBB dan tanpa adanya veto dari anggota tetap DK PBB.

Setelah perjuangan panjang yang dilakukan Palestina, ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman. Tidak adanya resolusi dalam DK PBB membuat langkah Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB pun kandas. Hal ini disebabkan adanya veto dari AS yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus Palestina Israel hanya bisa melalui negosiasi.

AS merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, namun dalam kasus ini mengapa AS tidak bisa memberikan pengakuan